

# Model Pembangunan Pedesaan Berbasis TIK

Kristian Cahyandi<sup>1\*</sup>, Hari Sucahyowati<sup>2</sup>, Dedeh Suryani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga dan Kepelabuhan, Akademi Maritim Nusantara

<sup>3</sup>Nautika, Akademi Maritim Nusantara

<sup>1,2,3</sup>Jl. Kendeng No. 307, Cilacap, 53223, Indonesia

E-mail: kristian\_cahyandi@amn.ac.id<sup>1</sup>, harisucahyowati@amn.ac.id<sup>2</sup>, dedeh\_suryani@amn.ac.id<sup>3</sup>

\*penulis korespondensi

Published: 30 Maret 2024

**Abstrak** - Penyesuaian secara konseptual dengan didukung prosedur yang jelas diperlukan untuk peningkatan pembangunan pedesaan. Arah pembangunan saat ini khususnya di pedesaan harus difokuskan pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan bukan hanya pada sektor agraris dan pembangunan infrastruktur dasar. Di era digital, pelaksanaan pembangunan pedesaan memerlukan strategi komunikasi konvergen yang menggabungkan media massa/online, hybrid, dengan melibatkan komunikasi interpersonal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak dari berbagai generasi guna mempercepat tujuan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dan menggunakan data primer dari Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Selain itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek penelitian digunakan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aktivitas masyarakat di tingkat desa fungsi dan penggunaan TIK tidak bisa dikesampingkan keberadaannya, namun penggunaannya harus sesuai dengan kemanfaatan secara positif. Salah satu upaya agar teknologi informasi dapat termanfaatkan dengan baik yaitu melalui sosialisasi secara terus menerus lewat berbagai acara kegiatan social kemasyarakatan maupun keagamaan.

**Kata kunci:** teknologi, informasi, komunikasi, pembangunan, desa

**Abstract** - Conceptual adjustments supported by clear procedures are needed to improve rural development. The current direction of development, especially in rural areas, must be focused on advances in information and communication technology (ICT) and not only on the agricultural sector and basic infrastructure development. In the digital era, implementing rural development requires a convergent communication strategy that combines mass/online, hybrid media, and involves interpersonal communication. The aim is to increase participation and involvement of all parties from various generations to accelerate development goals. This research uses quantitative descriptive methodology and uses primary data from Cilacap Village, South Cilacap District, and Cilacap Regency. Apart from that, observation, interviews and documentation of research objects were used in data collection. The results of this research show that in community activities at the village level the function and use of ICT cannot be ruled out, but its use must be in accordance with positive benefits. One effort to ensure that information technology can be put to good use is through continuous outreach through various social and religious events.

**Keywords:** technology, information, communication, development, villages

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang secara sadar, terencana, dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh suatu negara, atau pemerintahan dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan dan perubahan menuju pembangunan nasional [1]. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh, pembangunan pedesaan harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah pusat dan daerah. Artinya, pembangunan harus diupayakan dan direncanakan secara makro [8]. Pembangunan sektor pedesaan merupakan pembangunan yang bertitik tumpu pada pedesaan dengan mengedepankan *local wisdom* pada kawasan pedesaan [2], yang meliputi aspek bercirikan fisik dan geografis masyarakat, aspek sosial budaya, pola kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan, pola keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, sektor kelembagaan desa, yang merupakan ciri-ciri sebuah kawasan pemukiman.

Model dapat juga diartikan sebagai *blueprint* / cetak biru, representasi, atau deskripsi yang sering kali digunakan untuk menggambarkan bentuk idealisasi atau juga sebagai bentuk penyederhanaan tentang suatu objek, sistem, atau konsep. Bentuknya dapat berupa model gambar (gambar desain, *print*), rumusan matematis, atau model fisik (mockup, prototype) [3]. Gambaran tentang pembangunan desa, dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Kondisi yang kerap kali dialami oleh desa adalah adanya situasi stagnasi dalam pembangunan dan terisolasi dari pusat Pembangunan [4]. Penyesuaian suatu model diperlukan ketika mengkaji perspektif lingkungan hidup desa untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota [5]. Hal ini dapat dicapai dengan beradaptasi dari paradigma pembangunan regional ke pedesaan khususnya daerah tertinggal (*base on village*).

Pola pembangunan pedesaan memerlukan penyesuaian konseptual dan prosedural yang substansial. Gagasan pembangunan kini harus lebih fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bukan hanya industri pertanian dan Pembangunan infrastruktur dasar. [6]. Di era digital modern, pelaksanaan pembangunan pedesaan memerlukan sistem komunikasi konvergen yang menggabungkan media massa/online, media hybrid, dan komunikasi interpersonal [7]. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai generasi guna mempercepat tujuan pembangunan. Karena kehadiran elemen masyarakat yang beragam sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Masyarakat desa juga perlu untuk membangun dirinya sendiri menghadapi perubahan teknologi yang demikian pesat [8]. Sementara itu, strategi pembangunan pemerintah saat ini masih berorientasi pada proyek.

Pemerintah tidak lagi dapat dipandang berada di atas rakyat dengan pola interaksi dan jaringan komunikasi pembangunan yang hanya menciptakan pola komunikasi top-down. Dalam sistem politik terbuka seperti Indonesia, pemerintah harus memandang masyarakat mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah. Teknologi informasi yang sifatnya terbuka dalam situasi ini dapat lebih mendorong adanya persamaan kedudukan, transparansi, dan unsur keterlibatan [9].

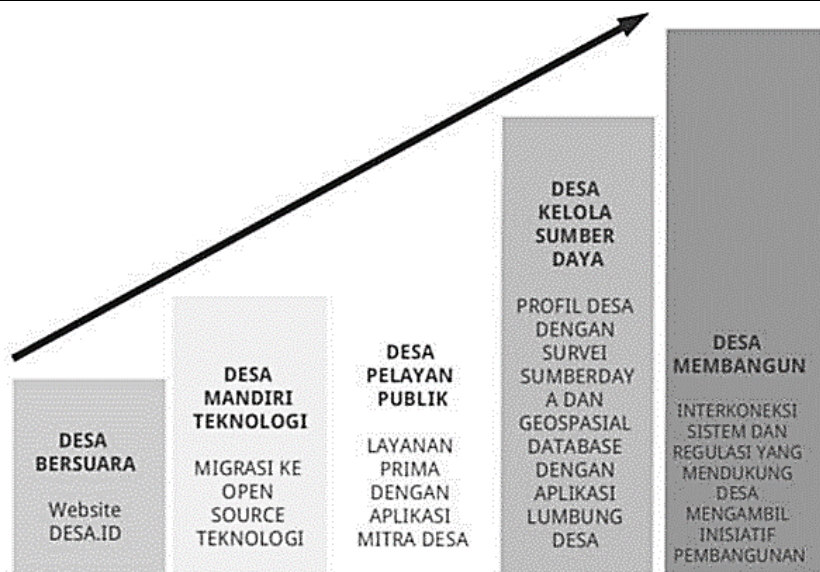
Sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan daerah akan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan pedesaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur TIK di pedesaan. Misalnya, poin-poin berikut ini tercakup dalam Pasal 86 UU Desa:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
- 3) Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
- 5) Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, paradigma pembangunan pedesaan berbasis internet menjadi semakin signifikan. Karena setiap individu mempunyai "hak asasi" atas ketersediaan informasi, dan karena komponen tatanan pada dasarnya memerlukan informasi yang benar dan tepat waktu agar dapat memilih respon yang tepat [10].

Model pembangunan desa dapat terwujud dengan beberapa tahapan yang saling berhubungan dalam proses pembangunan desa, berdasarkan kajian tinjauan literatur. [11],

- 1) Membuat halaman web desa dengan menggunakan domain desa.id untuk membangun jaringan informasi pedesaan berbasis internet.
- 2) Mempromosikan komunitas desa mandiri dengan beralih ke teknologi *open source*.
- 3) Memanfaatkan aplikasi Android untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 4) Memanfaatkan aplikasi lumbung desa dan survei sumber daya untuk mengelola sumber daya sesuai profil desa dan data geografis.
- 5) Membangun desa dengan sistem dan aturan terpadu yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.



Gambar 1. Tahapan pembangunan pedesaan (Gufran, 2023)

Artikel ini merupakan penelitian awal yang perlu pengembangan lebih lanjut, yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah belum dilakukannya pengambilan tahapan teknis hingga *prototype* fungsional. Yang membedakan dengan artikel sejenis, adanya usulan keterlibatan pemerintah kota/kabupaten sebagai pihak penjamin bagi investor pengadaan sarpras TIK, serta pendampingan berkelanjutan melalui muatan dalam kegiatan sosial maupun keagamaan.

## 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan data primer dari Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Sebagai pelengkap, dilakukan penggalian data melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian.

Dengan pendekatan pragmatis, penggunaan desain kualitatif menjadi penekanan utama dalam penelitian pembuatan model ini. Metode ini berupaya untuk mengatasi masalah nyata dalam kehidupan masyarakat disbanding hanya berfokus pada satu teori saja [12]. Pendekatan ini menjadi relevan, khususnya untuk menghasilkan model pemanfaatan media social untuk pengembangan sumber daya pedesaan. Metode pengumpulan data melalui: wawancara yang mendalam (*indepth interview*). Strategi ini menjadi relevan, khususnya dalam hal memberikan contoh bagaimana menggunakan media sosial untuk meningkatkan sumber daya pedesaan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Jenis pesan dan interaksi yang terjadi di media sosial diidentifikasi melalui analisis konten pesan, khususnya yang terkait dengan institusi lokal atau desa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Model Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembangunan Pedesaan

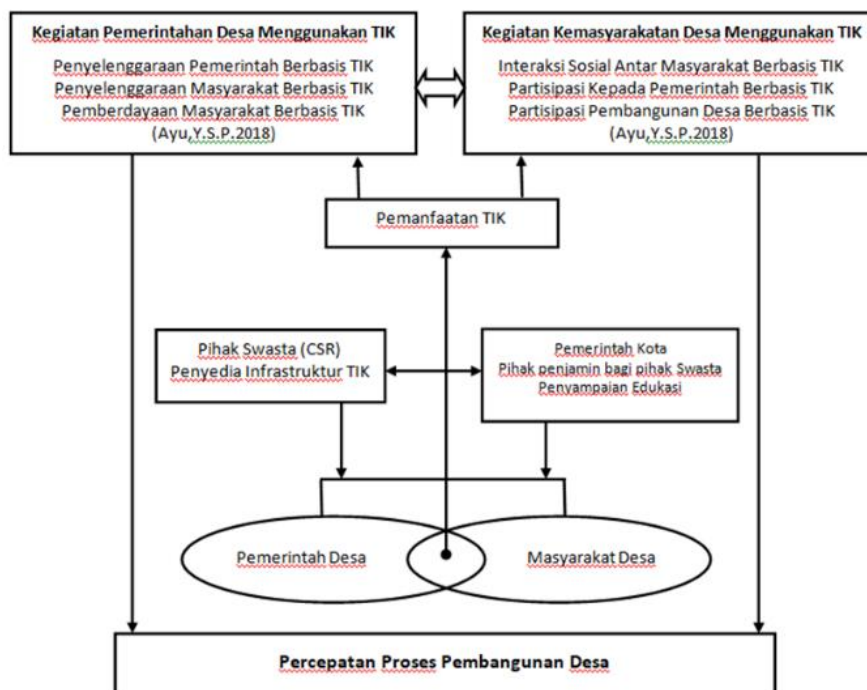
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat desa dijelaskan melalui Gambar 2. pada dasarnya ditujukan kepada 2 (dua) aktor utama yang ada di desa, yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa merupakan aktor yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mana jalannya struktur tertinggi pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan kepala desa harus menjadi pihak pertama yang memberikan contoh sekaligus yang menggerakkan masyarakat. Mengenai peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan berbasis TIK dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, peran pemerintah desa tidak terlepas dari keempat fungsi pemerintah desa yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan desa secara cepat dan efisien dilakukan dengan mengoptimalkan TIK yang ada, contohnya seperti memberikan layanan berbasis daring/*online* yang berupa akses masyarakat terhadap kebutuhan administrasi kependudukan dengan tanpa harus mendatangi kantor pemerintah desa secara langsung, dengan menggunakan media sosial layanan desa *online* yang mana masyarakat apabila membutuhkan dokumentasi kependudukan hanya butuh untuk menulis pesan yang disertai identitas diri serta layanan/dokumen yang dibutuhkan, sehingga aparat desa akan menindaklanjuti pesan dari masyarakat tersebut, apabila dokumen telah tersedia maka aparat desa tinggal mengirim ulang pesan kepada masyarakat untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan tersebut, proses ini akan mempersingkat waktu.

Penyelenggaraan pembangunan dapat diwujudkan oleh pemerintah seperti dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang selama ini menggunakan sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa yang menghadirkan para tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam satu forum, dengan

menghadirkan pilihan berupa Musrembang Desa secara virtual/daring. Dalam Musrembang Daring masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada di desa dipertemukan dalam forum virtual, proses diskusi dan perencanaan program pembangunan dilakukan tanpa harus tatap muka, sekalipun demikian diharapkan substansi dan proses penyusunan berbagai program yang akan dilaksanakan di desa akan berjalan secara konstruktif sama halnya dengan penyelenggaraan yang dilakukan secara tatap muka atau menghadirkan interaksi sosial secara fisik.

Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa dapat dilakukan secara intens melalui penggunaan aplikasi jejaring sosial semisal grup whatsapp yang mana pemerintah desa dan masyarakat dipertemukan secara virtual, proses penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pemanfaatan video, masyarakat dapat melihat secara langsung melalui tayangan video yang ditampilkan.



Gambar 2. Model Pemanfaatan TIK di Tingkat Desa

Kedua, masyarakat dalam konteks desa memiliki peran yang sangat penting, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berhak menentukan tujuan desa di masa yang akan datang, serta masyarakat sebagai objek yang mana kebijakan ditujukan untuk mengatur masyarakat. Peran masyarakat baik sebagai subjek maupun sebagai objek tersebut dalam prakteknya dapat diwujudkan kedalam pola interaksi masyarakat, serta pola partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Penggunaan handphone oleh masyarakat harus dioptimalkan tidak hanya sebagai media untuk melakukan panggilan suara atau mengirim pesan, tetapi juga harus dapat dijadikan sebagai sarana interaksi sosial yang konstruktif seperti adanya pemanfaatan handphone sebagai sarana diskusi antar masyarakat bidang keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan dengan mendukung dan memanfaatkan fasilitas publik berbasis daring/*online* yang bisa disediakan oleh pemerintah desa, hal ini selain diwujudkan sebagai upaya mendukung pemerintah desa dalam pengembangan layanan pemerintahan berbasis kepada TIK, juga ditujukan sebagai adanya pilihan model kebutuhan pelayanan masyarakat yang dahulunya lebih memilih kepada layanan publik secara langsung dengan cara mendatangi kantor desa digantikan dengan layanan publik berbasis TIK yang mana proses pelayanan tidak sepenuhnya didapatkan melalui datang langsung ke kantor desa.

Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan media informasi sebagai salah satu alternatif untuk berpartisipasi dalam pembangunan seperti terlibat langsung dengan pemerintah desa membangun sistem informasi kependudukan secara digital, ikut terlibat dalam rembuk warga atau Musrembang secara daring/*online* dan lain sebagainya, dengan adanya pemanfaatan TIK maka partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan melalui sumbangsih tenaga dalam melakukan program pembangunan fisik, tetapi juga sumbangsih pemikiran dan secara aktif membangun keterlibatan dalam pembangunan yang memanfaatkan TIK juga termasuk dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

Agar TIK dapat menjadi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemanfaatan TIK di tingkat desa diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat desa tetapi juga mengarah kepada transformasi desa menjadi desa yang adaptif dan ramah lingkungan yang fleksibel dengan kemajuan TIK [13].

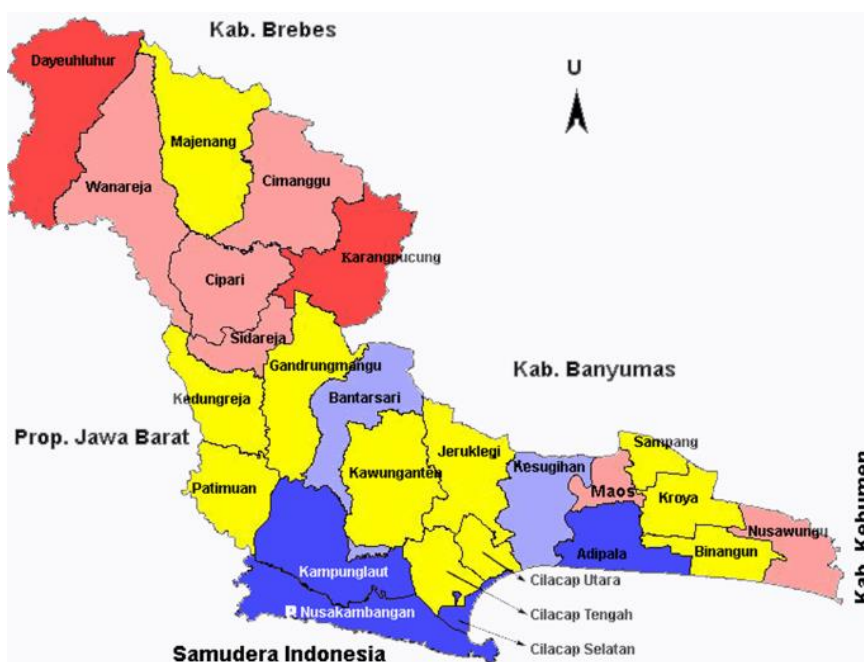
### 3.2 Model Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pada Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap

Mengambil lokasi Kelurahan Cilacap, disamping jumlah warga mayoritas adalah usia muda, sebagai salah satu elemen SDM produktif, sehingga diharapkan dalam penerapan penggunaan TIK dapat semakin melibatkan mereka dalam proses Pembangunan desa. Disamping itu dari letak geografisnya yang menempati posisi terluar dan berbatasan dengan perairan pantai menuju Samudera Hindia, sehingga membutuhkan koordinasi yang cepat dan tepat antar warga dalam salah satunya antisipasi bencana Tsunami.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur di Kelurahan Cilacap

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase (%)
1.	< 16	4.264	24,64
2.	16 – 65	12.208	70,56
3.	> 65	829	4,80
	Total	17.301	100,00

Kelurahan Cilacap pada wilayah Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kelurahan Cilacap sebesar 171,364 hektar, terdiri dari 18 Rukun Warga (RW) dan 93 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tegal Kamulyan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Nusakambangan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sidakaya dan sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 3. Peta Lokasi Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap

Di Kelurahan Cilacap, sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk perdagangan, jasa, industri, perikanan, dan kerajinan. Mengingat kedekatannya dengan pusat pemerintahan kecamatan, pusat pemerintahan kota, ibu kota kota/kabupaten, dan ibu kota provinsi yang masing-masing berjarak 2 kilometer dan 260 kilometer untuk provinsi. Kelurahan Cilacap menempati lokasi yang sangat strategis.

Industri perikanan mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Kelurahan Cilacap. Mayoritas warga Kelurahan Cilacap terdorong memanfaatkan sumber daya laut dengan bekerja sebagai nelayan karena didukung luasnya wilayah pesisir dan laut.

Berdasarkan data mengenai jenis dinding yang digunakan di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, diketahui masih banyak rumah yang menggunakan dinding bambu, yakni sebanyak 2.023 rumah dari total 2.682 rumah yang menggunakan dinding bambu di Kecamatan Cilacap Selatan.

Tabel 2. Banyaknya Rumah Tempat Tinggal Menurut jenis Dinding Tahun 2011

Kelurahan	Tembok	Sebagian Tembok	Papan/Kayu	Bambu	Jumlah
Tambakreja	1,959	1,879	1,012	550	5,400
Tegalreja	1,874	1,563	107	11	3,555
Sidakaya	2,152	523	113	15	2,803
Cilacap	804	705	283	2,023	3,815
Tegal Kamulyan	3,121	648	173	83	4,025
Jumlah	9,910	5,318	1,688	2,682	19,598
Tahun 2010	8,863	5,500	1,940	2,859	19,162
Tahun 2009	9,948	3,640	2,853	176	17,931
Tahun 2008	9,754	3,686	2,534	1,842	17,816

Pada pogram pembangunan pedesaan yang berbasis TIK diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan berperan lebih aktif dalam proses ketahanan dan pembangunan desa. Melihat kondisi pada Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, disamping tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Cilacap yang masih tergolong rendah, terdapat pula resiko terkenanya bencana alam di wilayah tersebut. Resiko bencana di suatu wilayah dapat meningkat jika potensi kejadian bahaya yang tinggi bertemu dengan kondisi social, ekonomi dan lingkungan yang tidak tertata untuk menghadapi bencana. Jika indikasi tersebut diletakkan untuk melihat kondisi Kelurahan Cilacap maka bisa dilihat sebagai adanya suatu kerentanan wilayah terhadap bahaya.

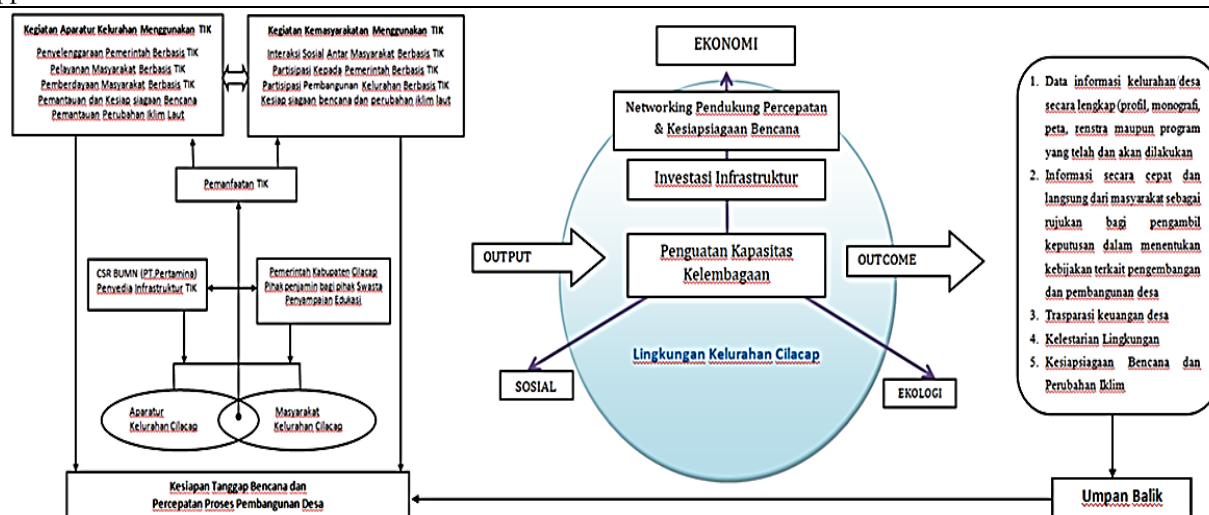
Tabel 3. Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Selular serta Kondisi Sinyal Menurut Desa di Kecamatan Cilacap Selatan, 2022

Desa <i>Village</i>	Jumlah Menara Telepon Selular (BTS)	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Selular	Kondisi Sinyal Telepon Selular
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tambakreja	7	5	Sangat kuat
2. Tegalreja	2	5	Sangat kuat
3. Sidakaya	1	5	Sangat kuat
4. Cilacap	2	5	Sangat kuat
5. Tegalkamulyan	4	5	Sangat kuat

Maka perlu dibuat suatu pengembangan model yang dapat mengatasi resiko-resiko kerentanan yang timbul pada Kelurahan Cilacap melalui pendekatan TIK agar dapat mempercepat proses pembangunan dan penguatan di wilayah tersebut. Asumsi yang dibangun dalam penerapan TIK pada Kelurahan Cilacap adalah akan didapatkannya:

- 1) Data kecamatan/desa secara lengkap, khususnya mengacu pada profil desa, peta desa, monografi desa, serta rencana dan program strategis desa yang telah dan akan dilakukan.
- 2) Para pengambil keputusan dapat menggunakan informasi dari masyarakat yang cepat dan langsung untuk menginformasikan keputusan mereka mengenai pembangunan dan kebijakan desa.
- 3) Trasparansi keuangan desa
- 4) Kelestarian Lingkungan





Gambar 4. Penerapan Model Pada Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap

#### 4. KESIMPULAN

Fungsi dan pemanfaatan TIK tidak lagi dapat diabaikan keberadaannya, begitu juga terhadap kegiatan kemasyarakatan pada tingkat pedesaan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pengadaan infrastruktur TIK sebagai pihak penjamin bagi pemberi pinjaman dana maupun pihak CSR Perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Dalam pelaksanaannya penggunaan harus sesuai secara tepat guna. Salah satu jalan agar teknologi informasi dapat termanfaatkan dengan baik adalah dengan cara sosialisasi secara terus menerus diberikan melalui berbagai acara kegiatan social kemasyarakatan maupun keagamaan, yang bermuatan mengenai pengenalan teknologi informasi sekaligus manfaatnya bagi kehidupan sosial masyarakat desa, menyadarkan masyarakat mengenai cara yang bertanggung jawab dan benar dalam memanfaatkan teknologi sehingga dapat digunakan sebagai alat informasi dan menunjang kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan gagap teknologi pada semua tingkatan masyarakat dalam menghadapi peningkatan teknologi informasi. Menginformasikan dan mendidik masyarakat pedesaan tentang potensi resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Mengupayakan meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat desa dalam melakukan analisis kritis dan pengambilan keputusan dalam menanggapi berbagai informasi yang masuk dengan memperkuat daya nalar.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada Perangkat Desa dan anggota paguyuban masyarakat Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, serta Akademi Maritim Nusantara-Cilacap dalam mendukung penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja atas diskusi yang mendalam.

#### Daftar Pustaka

- [1] Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Desa*.
- [2] Y. E. Nahuddin, R. SA, and M. M. Agung, "Problems of a New Paradigm in the Legal Village Asset Management," *Nurani J. Kaji. Syari'ah dan Masy.*, vol. 23, no. 1, pp. 153–162, Jun. 2023, doi: 10.19109/nurani.v23i1.13373.
- [3] T. Tobirin, B. Harsanto, W. Wahyuningrat, and D. Indiahono, "Building Smart People In Overcoming Poverty In The Kendeng Mountain Area, Banyumas Regency," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1181, no. 1, p. 012024, May 2023, doi: 10.1088/1755-1315/1181/1/012024.
- [4] S. Sunardi, H. Haryanto, and N. Nurlinah, "Disparity Between E-Government and Human Resources in The Village," *J. ILMU Sos.*, vol. 18, no. 1, pp. 17–34, Nov. 2019, doi: 10.14710/jis.18.1.2019.17-34.
- [5] A. S. Rusdianto *et al.*, "Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital Terintegrasi di Desa Bendelan Bondowoso," *J. Pengabd. Masy. Indones.*, vol. 2, no. 6, pp. 727–733, Dec. 2022, doi: 10.52436/1.jpmi.796.
- [6] A. D. Rini, "Digitalization in the Community-based Tourism Development in Peripheral Areas: A Case Study of Sumbermanjing Wetan Village, Malang Regency," *JAS (Journal ASEAN Stud.)*, vol. 7, no. 2, Jan. 2020, doi: 10.21512/jas.v7i2.6115.
- [7] N. Nurchim and I. Nofikasari, "Analisis Model Pengembangan Telecenter Guna Mewujudkan Desa Pintar di Indonesia," *Fountain Informatics J.*, vol. 3, no. 2, p. 36, Nov. 2018, doi: 10.21111/fij.v3i2.2466.
- [8] T. D. Purwanto, N. Paramitha, and W. Agustian, "Strategi Digitalisasi Desa Menjadi Desa Modern Kecamatan Cambia Kota Prabumulih," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Bina Darma*, vol. 3, no. 1, pp. 62–71, Mar.

- 2023, doi: 10.33557/PENGABDIAN.V3I1.2113.
- [9] F. Fathurohman and E. Erdi, "Sistem Informasi Desa untuk Komunikasi Pembangunan yang Lebih Baik," *DST*, vol. 2, no. 2, pp. 126–133, Nov. 2022, doi: 10.47709/dst.v2i2.1575.
- [10] A. Susetyaningsih *et al.*, "Penerapan Teknologi Untuk Pengembangan Desa Wisata Cinunuk," *J. PkM MIFTEK*, vol. 3, no. 2, pp. 90–96, May 2023, doi: 10.33364/miftek/v.3-2.1314.
- [11] Gufran, Aman Ma'arij, and Hajairin, "VILLAGE GOVERNMENT LEGAL POLICIES IN INFORMATION TECHNOLOGY-BASED PUBLIC SERVICES," *Awang Long Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 550–554, May 2023, doi: 10.56301/awl.v5i2.757.
- [12] E. Santoso, "Peran jurnalisme warga dalam pemberdayaan masyarakat desa," *J. Kaji. Komun.*, vol. 7, no. 2, p. 224, Dec. 2019, doi: 10.24198/jkk.v7i2.19601.
- [13] B. D. Bandu, M. Assidiq, and U. Khairat, "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BUMDES MEHALAAN BERBASIS WEB," *J. Pegguruang Conf. Ser.*, vol. 3, no. 1, p. 362, May 2021, doi: 10.35329/jp.v3i1.2093.